

KESELARASAN HIDUP BEDA AGAMA DAN ALIRAN: Interaksi Nahdliyin, Kristiani, Buddhis, dan Ahmadi Di Kudus

Moh. Rosyid

STAIN Kudus

Email: mrosyid72@yahoo.co.id

ABSTRAK

Terjadinya konflik antar dan intern-umat beragama di negeri ini selalu mewarnai realitas sosial. Persoalan utama untuk dijadikan solusi adalah mencari akar persoalan yang memicu konflik. Akan tetapi, kehidupan warga beragama di negeri ini bukan berarti selalu terjadi konflik atau jika terdapat perbedaan pemeluk agama identik dengan konflik. Realitas penelitian tahun 2013 dengan teknik observasi dan wawancara dengan analisis deskriptif kualitatif di Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kudus, Jawa Tengah terwujud harmoni kehidupan antar dan intern-umat beragama. Jumlah perdukahan 4 dukuh, penduduk pada awal tahun 2012 sebanyak 4 ribu jiwa, 2.400 KK, mayoritas pemeluk Islam, Kristen 16 orang, Buddha 40 orang, dan jemaah Ahmadiyah 13 KK yang berada di satu kelurahan. Masing-masing memiliki tempat ibadah yang terdiri 5 masjid (masjid Sunan Muria di Gunung Muria, masjid yang dibangun pemerintah provinsi Jawa Tengah yang berada di wilayah wisata pegunungan Colo Muria, 2 masjid di perkampungan Desa Colo, dan 1 masjid warga Ahmadiyah), 11 musala di 4 perdukahan Desa Colo, 1 gereja yang bersebelahan dengan 1 Vihara. Vihara dibangun era kepresidenan Gus Dur. Terdapat 2 MI swasta, 2 SDN, 1 MTs swasta, 1 MA swasta,

3 TPQ, 1 TK, dan 1 RA. Kerukunan terwujud disebabkan oleh kehidupan sosial warga adanya kesadaran karena kesamaan aspek budaya dan perekonomian mayoritas skala sedang (tidak miskin) sehingga tidak mudah tersulut konflik, tidak adanya loko penggerak konflik, dan adanya ikatan kekeluargaan dan keakraban dalam pertemanan dan pertetangaan antar dan intern-pemeluk agama dan aliran.

Latar Belakang Masalah

Kerukunan umat beragama di Indonesia masih diwarnai catatan kelabu di tengah semakin tingginya kesadaran toleransi masyarakat. Faktor kesenjangan ekonomi dan kepentingan di luar agama seperti politik, rentan dibelokkan menjadi konflik agama. Kemudian muncul anggapan menyalahkan pihak *the others* atau *minhum* dan merasa benar sendiri atau hanya kelompoknya yang benar. Jika demikian, agama berpotensi diciptakan oleh umat beragama menjadi sumber ketidakrukunan atau pertikaian sesama warga bangsa. Untuk itu pentingnya pendakwah menyampaikan ajaran agama yang komprehensif, tidak sepotong-potong agar agama tidak menjadi legitimasi bagi pihak yang berbuat anarkhis untuk kepentingan perorangan atau kelompok. Dengan demikian, catatan kelabu kerukunan umat beragama akan berakhir. Konflik lazimnya dipicu oleh perbedaan ajaran agama bagi pemeluk agama yang memahami ajaran agama secara parsial, tanpa memahami pesan substansial. Penelitian ini berpijak dari asumsi dasar bahwa pendekatan budaya yang didialogkan dalam kehidupan sehari-hari oleh antarpemeluk agama dengan sesama pemeluk agama agar mampu mengurai konflik atau mengantisipasi konflik dengan mengedepankan empati sosial. Modal dasar kehidupan sosial beragama yang harmonis tersebut tercipta di tengah kehidupan warga Kudus yang berbeda agama dan seagama tetapi berbeda aliran, bahkan aliran yang mengaku muslim tersebut dinyatakan sesat oleh MUI.

Pada Februari 2011, sekitar 100 orang menyerang warga Ahmadiyah menyebabkan tiga warga ahmadi tewas di Kampung Peundeuy, Cikeusik, Pandeglang, Banten. Disusul tiga gereja di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dibakar se usai pengadilan

kasus penistaan agama oleh oknum yang tak bertanggung jawab karena mereka tak puas atas proses pengadilan dan melampiaskannya dengan merusak rumah ibadah umat agama lain. Pertengahan tahun, muncul isu penculikan dalam usaha perekrutan anggota Negara Islam Indonesia (NII). Jaringan baru NII yang didirikan tahun 1949 masih bergerak di bawah tanah, dengan cita-cita mendirikan Negara Islam. Tidak hanya mengancam agama lain, mereka hendak mengubah kesepakatan bersama NKRI. Saat isu itu mereda, Kota Ambon, Maluku, rusuh lagi pada pertengahan September 2011. Dua kelompok beragama bentrok akibat isu kematian tukang ojek yang menyebar liar. Konflik Ambon terasa terulang tahun 1999 dengan ribuan korban di Ambon dan Maluku. Sementara itu, kasus Gereja Kristen Indonesia Yasmin di Kota Bogor, Jabar, memanas setelah Wali Kota Bogor Diani Budiarto mencabut izin mendirikan bangunan (IMB) gereja itu, meskipun Mahkamah Agung memerintahkan pencabutan atas pembekuan IMB. Ombudsmen pun merekomendasikan pembukaan segel gereja Yasmin. Pada 18 September 2011, massa bersurban merusak tiga patung di pusat kota yaitu patung Gatotkaca di Persimpangan Parcom, Patung Semar di Persimpangan Sasak Beusi, dan patung Bima di Pertigaan Jalan Baru. Massa menilai keberadaan patung tak sesuai aspirasi masyarakat dan menghamburkan anggaran daerah. Perusakan terjadi pada pukul 11.30 melibatkan sedikitnya lima ribu orang. Tindakan anarkhis dilerai oleh aparat keamanan gabungan Polri, TNI, dan Satpol PP. Masa tersebut setelah mengikuti istighosah di Masjid Agung Purwakarta, Jabar. Menurut pimpinan Ponpes *Ad Duha*, Ustad Toto Taufik, aksi merupakan puncak kemarahan warga karena keinginan umat tak digubris (*Jawa Pos*, 19 September 2011, hlm.10). Perusakan sebagai bentuk protes warga terhadap Pemkab Purwakarta yang membangun patung dan menggelar ribuan tumpeng untuk pemecahan rekor Agustus 2011 yang mengabaikan penderitaan rakyat yang diimpit kemiskinan. Pada kasus sebelumnya, Ketua Forum Ulama Indonesia Purwakarta, Abdullah As Joban dan Sekretarisnya, Ahmad Muhaimin, dituntut ke Pengadilan oleh tiga lurah karena dinilai bertanggung jawab atas kerusakan patung Bima di jl.Ibrahim Singadilaga pada Agustus 2010 dengan tuntutan ganti rugi materiil Rp 102 juta dan imateriil Rp 3 miliar

(Kompas, 19 September 2011, hlm.23).

Hasil Survei Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta tahun 2000-2010 terhadap 1.200 responden yang berusia di atas 17 tahun di seluruh Indonesia secara acak dengan memperhitungkan keterwakilan kelompok masyarakat. Materi yang ditanyakan adalah bagaimana umat Islam jika hidup berdampingan dengan kelompok atau agama lain secara setara, sebagian besar menjawab keberatan. PPIM menawarkan solusi berupa dialog lintas-agama, pemerintah harus menegakkan hukum, keamanan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat (Kompas, 29 Maret 2011, hlm.4). Dalam laporan *Pew Research Center's Forum on Religions on Religion* (2011) lembaga nonpartisan internasional yang meneliti bidang demografi, media, agama, dan politik bahwa lebih dari 2,2 miliar manusia (lebih kurang sepertiga penduduk dunia) mengalami pelarangan/pembatasan (*restriction*) dan kebencian (*hostilities*) kehidupan beragama di 23 negara (12 persen), stagnasi di 163 negara (82 persen), dan penurunan di 12 negara (6 persen), baik oleh negara maupun masyarakat. *Pew Research* menyumbangkan *The Government Restrictions Index* (GRI)-indeks yang mengukur tingkat restriksi pemerintah terhadap penganut agama, khususnya dari kelompok minoritas- dan *The Social Hostilities Index* (SHI)- mengukur tingkat ancaman, tekanan, kebencian, permusuhan, dan intimidasi oleh individu dan anggota masyarakat terhadap kelompok agama minoritas (Thoyyar, 2011:7).

Temuan penelitian *The Wahid Institute*, terjadi pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pada 2010, terdapat 62 kasus dan tahun 2011 terdapat 92 kasus, meningkat 18 persen. Pelarangan dan pembatasan aktivitas keagamaan atau kegiatan ibadah tercatat 49 kasus, tindakan intimidasi dan ancaman kekerasan oleh aparat negara 20 kasus, pembiaran kekerasan 11 kasus, kekerasan dan pemaksaan keyakinan serta penyegelan dan pelarangan rumah ibadah masing-masing 9 kasus, dan kriminalisasi atau viktimisasi keyakinan 4 kasus. Institusi negara tercatat menjadi pelaku pelanggaran kebebasan beragama yang paling banyak adalah polisi menempati peringkat pertama dengan 32 kali, disusul bupati, wali kota, atau pejabat di lingkungan pemda

sebanyak 28 kali. Pelaku pelanggaran lainnya adalah tentara 16, satpol PP 10, pemprov 8, kantor kemenag dan KUA 8. Jabar merupakan daerah dengan jumlah sebaran wilayah pelanggaran tertinggi yakni 55 kasus, Banten 9 kasus, Aceh 5 kasus, Jatim, Jateng, dan Sulsel masing-masing 4 kasus. Tindakan intoleransi dalam beragama dan berkeyakinan tahun 2010 sebanyak 134 kasus, tahun 2011 sebanyak 184 kasus. Kategori tindakan intoleransi yang paling tinggi adalah intimidasi dan ancaman kekerasan atas nama agama 48 kasus, penyebaran kebencian terhadap kelompok lain 27 kasus, pembakaran dan perusakan properti 26 kasus, dan diskriminasi atas dasar agama 26 kasus. Pelanggaran kebebasan beragama/intoleransi di Jabar 105 kasus, Jatim 17, Jateng 15, Jakarta 13, dan Riau 9 kasus. Simpulan dari *The Wahid Institute* bahwa pemerintah masih menganggap pelanggaran kebebasan beragama dan intoleransi bukan persoalan serius dan tidak pernah serius menanggapi laporan (*Kompas*, 30 Desember 2011, hlm.5).

Kekerasan demi kekerasan itu seakan menjadi potret buram negeri yang terkenal dalam syair lagu sebagai *gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo* (damai, makmur, sejahtera, tenteram, dan sentosa). Kekerasan tersebut dalam pepatah Jawa seperti *ajur mumur ambeg angkoro, budhi cendholo* (rusak binasa karena angkara murka akibat rusaknya budi pekerti). Hasil survei *Setara Institute* tahun 2011 tentang persepsi publik tentang Islam radikal di Solo, Sukoharjo, Klaten, Temanggung, Karanganyar, Pekalongan, Pemalang, Kendal (Jateng) dan Sleman, Yogyakarta, dan Bantul (DIY). Jumlah responden 1.200 orang dengan *margin of error* 2,2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, pengambilan sampel melalui *stratified random sampling*, dengan teknik wawancara tatap muka (*Kompas*, 22 November 2011, hlm.4). Data menunjukkan, warga melakukan perlawanan terhadap kelompok radikal, meskipun berita kekerasan masih tetap berlangsung. Sebagaimana peledakan markas FPI di Desa Balecatur, Kec. Gamping, Sleman Jl. Wates Km.8 Yogyakarta pada dini hari, 01.30 WIB, 15 Desember mengakibatkan rusaknya sebagian bangunan dan anggota FPI luka bakar (Agus Susanto, 35 th) (*Suara Merdeka*, 17 Desember 2011, hlm.G).

Terdapat info yang sedikit melegakan bagi warga bangsa

berdasarkan pernyataan Ketua Umum PP Muhammadiyah (Din Syamsuddin), mantan Ketum PB NU (K.H. Hasyim Muzadi), dan Rohaniawan (Frans Magnis Suseno) bahwa komunikasi antarpemimpin agama di Indonesia tahun 2011 semakin baik, meskipun terjadi sejumlah konflik dan kekerasan atas nama agama. Hal ini bisa menjadi modal yang baik untuk terus membangun kerukunan antarumat beragama di masa mendatang. Tren positif tersebut ditandai dengan kerapnya pertemuan di antara tokoh agama dan lintas agama jika ada masalah yang membutuhkan penanganan bersama karena di setiap agama ada kelompok garis keras yang sulit menerima perbedaan. Saat ini agama sangat rentan dibajak dan dimanfaatkan kelompok tertentu untuk kepentingan masing-masing, termasuk kepentingan politik. Sebab, umat beragama belum benar-benar memahami permainan politik dan sebagian kehidupannya masih belum sejahtera. Sentimen ideologis agama yang kuat juga mudah untuk diletupkan menjadi gesekan. Kaum agamawan diimbau mencegah kemungkinan itu agar agama tetap menjadi kekuatan pemersatu, bukan pemecah bangsa. Pengurus FKUB bersama tokoh agama di daerah didorong membuat jaringan kerukunan antarumat beragama agar tak mudah terpancing untuk masuk dalam gesekan yang akar penyebabnya sebenarnya bukan soal agama (*Kompas*, 26 November 2011, hlm.3).

Berdasarkan data *Institut Titian Perdamaian* pada 2008 rata-rata terjadi 1,5 kekerasan per hari yang meningkat menjadi 4 kasus per hari pada 2010 dan konflik tak selalu bernuansa agama, tetapi bertumpu pada motif politik (pesta demokrasi lokal) dan sumber daya alam (implementasi otda). Dari 600 kasus kekerasan pada 2009, hanya 6 berbau agama dan hingga semester pertama 2010, kekerasan berbau agama hanya 10 kasus dari 752 peristiwa yang terdata secara nasional. Berdasarkan persentase, konflik politik meningkat dari 12 persen pada 2009 menjadi 16 persen per Juni 2010. Adapun konflik SDA dari 9 menjadi 10 persen. Penyebaran konflik merata, di DKI terbanyak konflik horizontal dengan 110 kasus pada 2009 dan 89 kasus hingga pertengahan 2010, Jatim 87 kasus, Sulsel 76 kasus, Jabar 66 kasus, Maluku 47 kasus, NTB 41 kasus, Sulawesi Tenggara dan Jateng 34 kasus, Sumut 32 kasus, Sumsel 30 kasus, dan Papua 29 kasus (*Republika*, 3 Maret 2011,

hlm.23). Berdasarkan data catatan akhir tahun 2011 dari *Setara Institute* terjadi 103 tindakan Negara melalui institusi dan 244 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang mengandung 299 bentuk tindakan di lima provinsi yang masuk daftar tertinggi pelanggaran terhadap kebebasan beragama. Di Jawa Barat sebanyak 57 peristiwa, Sulawesi Selatan 45 peristiwa, Jatim 31 peristiwa, Sumut 24 peristiwa, Banten 12 peristiwa, Jateng 11 peristiwa. Peristiwa tersebut berkaitan dengan kasus Ahmadiyah, perusakan rumah ibadah, pemaksaan keluar dari keyakinan, ancaman penyerangan, dan perusakan rumah. Ketua *Setara Institute*, Hendardi, menyatakan bahwa Presiden SBY telah 19 kali berpidato untuk menyampaikan pesan toleransi, tetapi pelanggaran terhadap kebebasan beragama justru meningkat (*Suara Merdeka*, 20 Desember 2011, hlm.2).

Terdapat realitas yang menarik kaitannya dengan respon publik yang resisten (menolak) terhadap Islam radikal. Masyarakat menilai, keberadaan kelompok radikal aktivitasnya mengakibatkan munculnya citra negatif terhadap agama dan umat Islam, bahkan sangat sedikit anggota masyarakat yang bersedia mendukung kelompok radikal. Dialog lintas agama seyogyanya jangan hanya berlangsung di tingkat elit dan bersifat retorika, tetapi dikembangkan hingga menjadi gerakan masyarakat awam dan menciptakan kerukunan dalam kehidupan nyata. Inti penting untuk mengurangi ketegangan atau konflik antarumat beragama. Wacana dialog lintas agama sudah didengungkan oleh pemerintah dan tokoh agama di Indonesia. Namun, selama itu pula, konflik dan kekerasan atas nama agama masih berlangsung karena dialog itu masih menjadi wacana elit.

Data di atas menandakan bahwa konflik antar dan intern umat beragama muncul dan timbul-tenggelam di negeri ini. Akan tetapi, bukan berarti semua wilayah negeri ini selalu terjadi konflik intern atau antarumat beragama, sebagaimana di Desa Colo, Dawe, Kudus, Jawa Tengah mayoritas pemeluk Islam, Kristen 16 orang, Buddha 40 orang, dan pemeluk aliran Ahmadiyah 10 KK yang berada di satu kelurahan dan tempat ibadahnya berdekatan. Peneliti belum mendapatkan data adanya konflik terbuka di desa di mana waliyullah Sunan Muria disemayamkan, sehingga muncul

pertanyaan bagaimana interaksi antar-pemeluk agama dan aliran serta faktor apakah yang mendukung terjadinya kerukunan antar dan intern pemeluk agama dan aliran di Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus tahun 2013?

Landasan Teori

Kerangka teori yang digunakan meliputi konsep (1) harmoni interaksi sosial yakni terciptanya keselarasan sosial, manakala dalam bersesama, manusia mengedepankan sifat seimbang (*at-tawazun*) kaitannya dengan menerima informasi dari berbagai sumber, masudnya tak latah menghakimi salah, toleran (*at-tasamuh*) maksudnya memahami dan menghormati di tengah perbedaan, khususnya beda agama atau aliran, dan adil (*al-adalah*) yakni bersikap tegas jika menjadi penguasa dalam menegakkan hukum, (2) empati sosial yakni kesadaran identitas sosial dalam meningkatkan kapasitas empati sebenarnya dapat dilakukan dengan lebih menambah kesadaran diri (*self-aware autonomy*) dan mengurangi tendensi mengklaim apa yang benar dan apa yang salah. Kesadaran diri/mawas diri bahwa setiap orang memiliki keunikan, kelebihan, dan kekurangan yang dapat saling melengkapi (Dania, 2011:7), (3) perilaku agresif, (4) faktor pemicu kekerasan, (5) sumber konflik, (6) ketegasan terhadap pelanggar. Sebagaimana *grand design* penyelesaian konflik dengan tahap jangka pendek, menengah, dan panjang. Tahapan tersebut perlu memahami karakter konflik yakni faktor apa yang memicu dan penyelesaiannya dituntaskan dengan mencari akar persoalan. Perlu pula ketegasan di setiap pemimpin lokal, dan (7) format dialog antaragama.

Presiden SBY pada 27 Juni 2011 memberi sambutan pada peresmian sarana dan prasarana Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) di Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat meminta umat dibimbing untuk dapat menjalankan ajaran Islam yang benar, agar persoalan yang timbul akibat penyimpangan pelaksanaan ajaran Islam dapat teratasi dan menjalankan syariat dengan sesungguhnya. Misalnya, apa pengertian jihad yang benar menurut Islam, apakah benar ketika membunuh saudaranya yang tidak bersalah, surga balasannya, termasuk aksi bunuh diri. Saat ini umat Islam di dunia menghadapi tiga tantangan besar

yakni ketidakadilan, persepsi tidak benar mengenai Islam, serta penyimpangan pelaksanaan ajaran Islam oleh segelintir orang. Umat Islam harus gigih memperjuangkan keadilan hakiki dengan cara cerdas dan tepat tanpa menimbulkan masalah baru yang bisa merugikan nama Islam. Persepsi keliru tentang Islam diatasi dengan usaha terus-menerus dari umat Islam untuk berdialog dengan semua pihak yang selama ini salah mengerti tentang Islam, sehingga tokoh muslim harus aktif mengemban tugas tersebut. Tidak ada pilihan selain memperkuat bimbingan terhadap umat.

Presiden SBY pada 28 Juni 2011 saat bersilatullah dengan Peserta Musabaqah Hafalan Alquran dan Hadis Pangeran Sultan Bin Abdul Aziz Abu Su'ud Tingkat Asia dan Pasifik di Istana Negara, Jakarta. Presiden mengajak tokoh agama, ulama, dan pemimpin ormas Islam di Tanah Air untuk membimbing umatnya dalam menciptakan tatanan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, membangun akhlak mulia dan sikap positif (perilaku damai, ramah, dan toleran) dalam menghadapi tantangan global dengan merujuk pada al-Quran dan hadis. Nilai islami dan spirit qurani perlu menjadi rujukan pergaulan internasional, terutama di tengah arus pergeseran nilai, norma, dan perilaku kemanusiaan saat ini. Perlunya mengaktualkan dan memberi kontribusi dalam membangun tatanan dunia yang makin aman, adil, damai, dan sejahtera. Cegah dan lindungi kaum Muslim dari pemahaman yang keliru dan menyimpang, apalagi yang menyuburkan radikalisme serta menyakiti kelompok tertentu hingga menimbulkan tindakan kekerasan. Presiden SBY menjelang pergantian tahun 2011 mengajak masyarakat untuk memperkokoh persaudaraan dan kerukunan bangsa. Diharapkan tidak terjadi lagi kekerasan pada tahun 2012. Bahkan berkali-kali SBY menyatakan prihatin dan mengimbau supaya tidak ada lagi kekerasan, tetapi tidak ada langkah kongkret. Imbauan SBY menurut Hendardi, Badan Pekerja *Setara Institute*, dianggap sekedar kata-kata politik yang tidak ada gunanya untuk masyarakat. Konflik terjadi akibat kebijakan Negara yang tidak memberi keadilan dan perlindungan kepada warganya, penegakan hukum dan regulasi tidak berjalan, akar masalahnya terdapat pada kepemimpinan politik (*Kompas*, 3 Januari 2012, hlm.4).

Wakil Presiden Boediono didampingi Menteri Agama, Suryadharma Ali pada 29 Juni 2012 saat membuka Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia di Ponpes Cipasung, Tasikmalaya, Jabar menyatakan: ulama diharapkan berperan lebih aktif menjaga kehidupan beragama yang harmonis di Indonesia. Hal itu diperlukan di tengah beragamnya kelompok dengan pemikiran dan mazhab yang berbeda-beda. Kehidupan umat Islam di Indonesia semakin dinamis dalam era demokrasi terbuka dengan dukungan teknologi informasi yang berkembang pesat. Para ulama berkumpul untuk mencurahkan pikiran guna menjawab berbagai masalah, termasuk masalah kebangsaan yang aktual. Fatwa ulama menjadi alternatif untuk memecahkan masalah umat, sekaligus memberikan bimbingan dan pemikiran agar bangsa bisa melewati berbagai masalah. Ulama dapat berperan menjaga kerukunan dan mempertemukan perbedaan pandangan menjadi keseimbangan yang mencerminkan moderatisme Islam Indonesia. Wapres mendukung MUI menghasilkan pemikiran yang kontekstual dengan permasalahan Indonesia. Untuk memperkuat fatwa, MUI dapat bekerja sama dengan ahli, pakar, dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi. Perlu juga mengawal pelaksanaannya di masyarakat.

Selaku Ketua Umum MUI Pusat, Sahal Mahfudh mengatakan, forum Ijtima keempat dihadiri sekitar 750 ulama nasional dan mancanegara berlangsung 29 Juni s.d 2 Juli 2012. Forum tersebut merupakan salah satu usaha ulama memelihara pemikiran agama Islam yang dinamis dan konstruktif. Pembahasan akan difokuskan untuk masalah kebangsaan, keagamaan kontemporer, dan pembahasan aturan perundangan. Masalah itu antara lain terkait HAM, tata kelola pemerintahan yang baik, pemilihan kepala daerah, kepatuhan terhadap pemerintah, serta penyitaan harta koruptor. Hal itu untuk memperkokoh dan memperkuat fondasi kehidupan berbangsa, sesuai konstitusi. Pada forum tersebut, Menteri Agama, Suryadharma Ali mengingatkan pentingnya menjaga toleransi berjalan baik di Indonesia. Mayoritas umat Islam menghargai agama lain, meskipun populasinya kecil. Hari-hari besar masing-masing agama menjadi hari besar nasional dan dirayakan bersama. Bangsa Indonesia mempunyai

akar kerukunan umat beragama yang kuat. Banyak keluarga dengan anggota yang berbeda agama, tetapi berjalan baik, saling menghormati (*Kompas*, 30 Juni 2012, hlm.2). Sebelum pembukaan forum ulama tersebut, Presiden SBY -dinyatakan pada panitia forum ulama di Kantor Presiden, Jakarta pada 28 Juni 2012 ketika panitia memohon kehadirannya untuk membuka acara- meminta MUI lebih berperan dalam menjaga kerukunan di antara umat beragama dengan melakukan pendekatan yang lebih akrab dengan majelis agama lain. Ada nuansa masyarakat kita jurang rukun. Oleh karena itu, MUI terus membina dan mendampingi umat. Perlunya kerja sama yang baik antara MUI dan pemerintah terkait standardisasi halal. Presiden berhalangan hadir dan diwakilkan pada wakil presiden (*Kompas*, 29 Juni 2012, hlm.5).

Tahun demi tahun konflik muncul dan timbul-tenggelam sehingga kerukunan umat beragama baik intern maupun antarumat beragama dan umat berkeyakinan di negeri ini perlu dikokohkan. Masalah tersebut berakar pada banyaknya persoalan, dari dalam dan dari luar agama. Sebagian kelompok memperoleh pemahaman yang sempit tentang agama. Mereka juga kurang mengenal keragaman budaya alias kemajemukan. Faktor luar berasal dari banyak masalah yang membelit masyarakat, seperti kemiskinan, pengangguran, pendidikan, infrastruktur yang lemah atau masalah lingkungan. Pemerintah dinilai oleh masyarakat belum mampu membangun negeri yang sumber daya alamnya melimpah. Penegakan hukum yang lemah, bahkan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) kian subur. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK), menurut survei *Transparency International*, skor IPK Indonesia adalah 3, beranjak dari 0,2 dari sekor tahun lalu. Indonesia menempati peringkat ke-100 (menyamai Argentina, Benin, Burkina Faso, Djibouti, Gabon, Madagaskar, Malawi, Meksiko, Sao Tome and Prince, Suriname, dan Tanzania) dari 183 negara. Skor tersebut masih di bawah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand (*Kompas*, 2 Desember 2011, hlm.4). Tren kekerasan di Indonesia meningkat, toleransi beragama kian terkikis dan radikalisasi agama kian menguat yang terlihat dari merosotnya toleransi terhadap kelompok atau agama lain. Penyebab intoleransi menurut Imam Prasojto akibat tidak

ada lagi tokoh masyarakat atau pemimpin yang dihormati. Dulu masyarakat kuat karena ada inisiatif pemimpin lokal, munculnya otoritas tradisional secara turun-temurun karena kharisma pemimpin dalam wujud tokoh adat yang berperan mendamaikan konflik. Kini, semenjak lurah dijadikan PNS bagian dari birokrasi sehingga kehilangan ruh dan legitimasinya memudar (*Kompas*, 29 Maret 2011, hlm.4).

Kajian Riset Terdahulu

Riset para peneliti yang dijadikan telaah adalah *pertama*, interaksi interaktif umat muslim dengan kristiani di Kampung Cigugur, Kec.Cigugur, Kab.Kuningan, Jawa Barat. Warga kristiani tersebut memberi/mengirim makanan berupa roti kering setiap hari Natal kepada tetangganya yang muslim. Begitu pula bagi warga muslim memberikan ayam opor dan ketupat pada warga Kristiani jika bulan Lebaran. Kampung Cigugur dihuni mayoritas Suku Sunda yang semula kampung tersebut tempat pelarian Kiai Madrais, seorang berdarah biru Kesultanan Cirebon yang membangkang terhadap Belanda. Selanjutnya Kiai Madrais mengembangkan ajaran Sunda Wiwitan di Cigugur. Inti ajaran Sunda Wiwitan adalah identitas diri sebagai orang Sunda berupa sopan-santun, saling menghargai, dan saling asah-asih-asuh yang terus dilestarikan. Begitu pula Suku Lamaholot di Kab. Flores Timur, Lembata dan Kabupaten Alor, NTT. Kerukunan hidup antara warga Katolik dengan Islam laksana satu keluarga. Islam datang tahun 1321 oleh pedagang Gujarat dan Persia, sedangkan Katolik datang tahun 1511 oleh bangsa Portugis. Setiap Hari Natal, kaum muslimin membentuk panitia natal, sedangkan pada Hari Idul Fitri, kaum Katolik menjadi panitia Idul Fitri. Begitu pula ketika muslimin berangkat ke Tanah Suci Mekkah, dari Larantuka, ia diantar tokoh dan warga kristiani dan saat pulang dari Mekkah dijemput warga di terminal bus. Sebaliknya ketika warga Katolik ditahbiskan menjadi pastor, wakil ketua panitia tahbisan adalah warga muslim (Rini dan Kornelis, 2011:1).

Kedua, interaksi interaktif umat muslim dengan kristiani pada Suku Lamaholot, Flores Timur, NTT dengan ikatan pasar barter. Warga Kristen hidup di dataran tinggi sebagai petani yang memproduksi padi, jagung, umbi-umbian, pisang, dan sayur.

Sedangkan warga muslim hidup Desa Waiwerang, Adonara Timur, Flores Timur di pesisir pantai sebagai nelayan, petani garam, dan pedagang. Keduanya hidup rukun dengan ikatan pasar barter karena peredaran uang sangat terbatas sehingga memunculkan simbiosis mutualisme yang mengikatkan nilai persaudaraan, pasar barter, dan menjaga adat berupa kejujuran, keadilan, pengorbanan, dan rasa senasib hingga kini. Cara menukarkan barang tak berdasarkan ukuran atau alat timbang, tetapi berdasarkan kesepakatan dengan prinsip tak ada yang dirugikan. Takaran yang ditetapkan sudah berlaku turun-temurun. Misalnya 1 sisir pisang ditukar dengan 3 genggam ikan teri, 5 batang jagung dengan 1 piring garam dapur, 10 buah singkong dengan 8 ekor ikan kembung, 15 buah pinang muda dengan 1 ekor ikan cakalang. Kerukunan antarumat beragama tersebut didukung adanya semboyan hidup *tite nayu baya* (satu nenek moyang, bersaudara secara adat, dan keturunan). Islam datang di Lamaholot sebagai keturunan orang Bajo, Makassar dan pedagang dari Gujarat. Adapun warga kristiani sebagian datang dari Maluku dan sebagian dibaptis oleh misionaris Portugis. Tempat ibadah keduanya berdekatan tanpa persoalan (Kornelis, 2010:23).

Ketiga, perlunya berpijak dari intisari disertasi Darmansjah Djumala di Unpad, Bandung, *Soft Power dalam Penyelesaian Konflik: Studi tentang Politik Desentralisasi di Aceh*. Pemerintah sebaiknya mendahulukan pendekatan dialog dan kemanusiaan atau *soft power* daripada pengerahan kekuatan militer dan ancaman sanksi untuk mendamaikan konflik yang berkecamuk di daerah. Negosiasi damai pun harus dihasilkan melalui kompromi pihak yang bertikai, bukan solusi yang ditawarkan satu arah dari pemerintah pusat ke daerah. Keberhasilan dalam menyelesaikan konflik pusat-daerah hanya bisa terjadi apabila pemerintah pusat berani menempatkan dirinya sejajar dengan pihak seteru sehingga keduanya bisa berunding. Sebagaimana konflik di Aceh yang berlangsung sejak pemberontakan Daud Beureueh pada 1953. Konflik terselesaikan pada 2005 melalui mediasi di Helsinki karena pemerintahan SBY-JK sepenuhnya menggunakan pendekatan dialog tanpa sekali pun melibatkan operasi militer. Titik terang masalah Aceh baru didapatkan setelah Pemerintah Indonesia dan GAM duduk sederajat dan membahas kesepakatan

untuk mengakhiri konflik (*Kompas*, 30 Desember 2011, hlm.5).

Keempat, realitas yang dihadapi penulis hidup sebagai warga Dukuh Kayuapu Wetan, Desa Gondangmanis, Kecamatan Bae, Kudus di Rt.3/5 terdapat 1 jiwa pemeluk agama Kristen, di Rt.4/5 terdapat 11 KK beragama Kristen, di Rt.5/5 terdapat 4 KK beragama Kristen. Adapun di Dukuh Kayuapu Kulon terdapat 700 KK, sedangkan warga Desa Gondangmanis terdapat 15 ribu jiwa. Sejak penulis menetap tahun 2004 hingga kini (2012) sebagai warga di Kayuapu wetan, tidak pernah terjadi konflik antara muslim-kristiani. Hal ini disebabkan (1) antarpemeluk agama hidup rukun sebagai warga masyarakat, (2) pemeluk agama Kristen dengan muslim, berstatus sebagai saudara kandung dan atau menyamping, keduanya saling memahami sebagai warga dan keluarga, (3) antarkedua pemeluk agama, tidak memunculkan konflik kapasitasnya sebagai warga pemeluk agama yang berbeda, (4) warga kristiani yang berjumlah minoritas, mengikuti acara budaya yang bernuansa ritual jika diundang menghadiri acara. Seperti hajatan kematian, hajatan menantu, dan hajatan lain, (5) setiap Hari Raya Natal, warga Nasrani menyediakan hidangan makanan (*snack*) kepada tamu (muslim), sebagai bentuk penghormatan hari raya warga muslim.

Metode Penelitian

Hakikat penelitian sosial keagamaan adalah penelitian sosial dengan obyek agama, penelitian agama dengan metode dan pendekatan ilmu sosial, dan penelitian aspek sosial dari kehidupan keagamaan. Handalnya penelitian bila data tergalil dengan mengedepankan kredibilitas, transferabilitas, auditabilitas dan dependabilitas, dan konfirmabilitas. Kredibilitas tercipta jika antara data hasil studi dengan realitas fisik sensual dapat teramati dan terukur. Untuk menguji kredibilitas menggunakan teknik (i) menguji terpercayanya temuan (memperpanjang waktu penelitian sesuai kebutuhan dan menguji secara triangulasi), (ii) pertemuan antarpeneliti jika ada yang tak jelas, (iii) mengecek hipotesa awal, dan (iv) menguji temuan tentatif. Transferabilitas (membangun generalisasi) karena naturalis tanpa prediksi tetapi data riil (Muhadjir, 1996:125-129). Agama yang dipeluk setiap individu berpeluang dijadikan obyek penelitian dengan metode

yang tepat. Menurut Mudzhar (1998) lima gejala agama yang dapat diteliti (1) *scripture*, penelitian naskah atau sumber ajaran dan simbol agama, (2) penganut, pemimpin/pemuka dalam pemikiran, sikap, dan perilaku mengaktualisasikan ajaran dan keyakinan agamanya, (3) berupa ritus, lembaga, adat-istiadat, seperti tata cara salat, waris, atau perkawinan, (4) alat berupa tempat ibadah, lonceng, peci, dsb., dan (5) organisasi keagamaan, misalnya NU, Muhammadiyah, dsb.

Metode penelitian ini meliputi (1) teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi, (2) sasaran penelitian warga di Desa Colo, Dawe, Kudus yang terdapat muslim (NU), Hindu, kristiani, dan Ahmadiyah dijadikan obyek kajian dipilih secara non-random karena jumlahnya terbatas, kecuali muslim berdasarkan ketokohan dan sebagian warga muslim secara random, (3) Data yang dihimpun; berupa individu, kelompok warga desa di lokasi penelitian. Sasaran penelitian ini berkaitan dengan terciptanya harmoni sosial antar-pemeluk agama dalam satu desa. Penelitian ini informan utamanya warga nahdliyin, kristiani, buddhis, dan ahmadi warga Desa Colo secara random dan masyarakat Kudus. Kualifikasi hasil penelitian dan telaaahnya luas dengan pendekatan kualitatif. Tahapan analisis data berupa pengolahan, analisis, dan penafsiran. Penelitian ini dengan analisis kualitatif dan mengolah data (pemeriksaan pada seluruh data dari hasil wawancara, catatan lapangan), (b) analisis data, dan (c) penafsiran data untuk menarik simpulan penelitian. Proses analisis data sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan penelitian.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian dalam naskah ini pada dasarnya menjawab rumusan masalah yang bersumber dari data yang dianalisis penulis. Sebelum diulas hasil penelitian, perlu dipahami argumen dasar perlunya penelitian ini dilakukan. Penelitian sosial keagamaan perlu terus dilakukan dengan dasar, Pertama, negeri ini penduduknya memeluk beragam agama yang rentan terjadi konflik. Hal itu terjadi karena pemahaman umat beragama atas ajaran agama yang kurang optimal atau karena fanatisme sempit pemeluk agama yang menyebabkan menyalahkan terhadap sesama pemeluk agama atau

terhadap pemeluk agama lain. Kedua, agama berpotensi dijadikan sebagai cara meningkatkan kehidupan sosial. Dengan demikian, hasil penelitian sosial keagamaan berpeluang mengembangkan satu atau kedua hal tersebut sebagai modal pembangunan bangsa dengan cara meningkatkan kualitas interaksi umat beragama dan mengantisipasi jika akan terjadi konflik umat beragama.

Interaksi antar-pemeluk Agama dan Aliran di Kudus

Interaksi warga nahdliyin, kristiani, buddhis, dan ahmadi di Desa Colo, Dawe, Kudus yang berada dalam satu kawasan, hingga dituliskannya naskah ini, penulis tidak menemukan terjadinya konflik terbuka. Akan tetapi, realita yang ada adalah terjadinya harmoni kehidupan sosial antar-umat beragama. Keharmonisan terwujud karena berbagai hal, yang kunci dasarnya bahwa antar-warga yang seagama meskipun berbeda aliran dan antar-pemeluk agama memiliki potensi positif berupa,

Pertama, memiliki ikatan persaudaraan/kekerabatan yakni satu trah keturunan, mayoritas lahir dan dibesarkan bahkan menjadi tetangga dalam satu kawasan/wilayah desa.

Kedua, saling tercipta simbiosis mutualisme di bidang perekonomian dan pertetanggaan. Jaringan perekonomian didukung dengan kerja warga sebagai tukang ojek, pedagang kaki lima, dan petani.

Ketiga profesi tersebut dapat saling membutuhkan tenaga secara bergantian dan saling membutuhkan bantuan. *Ketiga*, minimnya pemicu konflik. Lazimnya konflik terpicu oleh berbagai hal. Secara sosiologis terdapat tiga faktor pemicu kekerasan yakni keyakinan, institusi, dan ritualisme. Pola kekerasan di Indonesia muncul secara sporadis dengan karakter yang berbeda antarwilayah yang memiliki fase dan episode masing-masing. Pemicu kekerasan berupa keyakinan; menurut Arie Sudjito (2011) agama memiliki tiga level yakni *believe system*, institusional, dan ritualisme. Ketika agama berada pada level sistem keyakinan maka tidak ada persoalan. Ketika agama pada institusi agama, muncullah rezim kekuasaan dalam penafsiran tentang kebenaran (*truth claim*) yang memunculkan konflik. Problem struktural dan ketidakmapanaan (kesenjangan) bidang ekonomi, pemahaman keagamaan, dan

politik yang menafikan budaya lokal, dan ketidakdewasaan kelompok, mudah mencuatkan kekerasan (Fikri, 2011:23).

Alasan manusia melakukan kebengisan dan berperilaku agresif dari aspek faktor internal karena mengalami kemampuan berpikir yang cenderung menempuh jalan kekerasan untuk menegakkan eksistensinya atau sekadar mempertahankan hidup. Kekerasan hanyalah cara, ketika tidak ada jalan lain. Ditambah frustrasi sosial akibat beban hidup yang makin berat sehingga menjadi semacam legitimasi seseorang melakukan kekerasan. Hal itu didukung hukum tidak mengakomodasi keadilan dan hukum tidak berwibawa, sistem pemerintahan yang korup, ketidakadilan sosial mendorong kebrutalan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Surahmat, 2011:12). Terjadinya konflik di Indonesia sering dipicu oleh persoalan sederhana, seperti pertikaian sekelompok pemuda, kekalahan persahabatan dalam olah raga, dsb. Hal itu jika tidak diantisipasi akan menyulut konflik. Menurut Ichsan Malik, ada lima sumber konflik di Indonesia (1) konflik struktural yakni adanya ketimpangan dalam akses dan control terhadap sumber daya alam, kebijakan yang tak adil, kesewenang-wenangan dalam mengambil keputusan, (2) konflik kepentingan yakni pemuasan kebutuhan dan cara memenuhinya dari satu kelompok yang mengorbankan kelompok lain (persaingan tak sehat), (3) konflik nilai karena perbedaan adat, ideologi, dan implementasi nilai agama sehingga nilai yang tak sesuai berbenturan. Konflik terjadi karena pemaksaan nilai pada pihak lain, (4) konflik hubungan sosial psikologis yang disebabkan oleh stereotip, prasangka, dan stigmatisasi, (5) konflik data yang diakibatkan kurangnya data dan informasi, perbedaan pandangan, salah komunikasi, dan perbedaan interpretasi suatu masalah yang menyebabkan distorsi informasi (*Republika*, 3 Maret 2011, hlm.24). Sumber konflik juga akibat warisan kasus yang belum tuntas. Hal ini posisinya bagaikan api dalam sekam jika tidak dituntaskan, sebagaimana mencuatnya kasus Ahmadiyah di berbagai daerah. Hal yang memicu terjadinya konflik tersebut tidak terjadi di lokasi penelitian. Berbagai faktor pemicu tersebut tidak terdapat atau warga Desa Colo tidak tersulut karena ikatan kultur yang menjadikan budaya sebagai soko guru kehidupan.

Keempat, tidak terdapat loko/penggerak memunculkan konflik. Peran tokoh agama yang pemeluknya minoritas tidak tampil di gelanggang sosial dengan menampakkan sosok yang menjadi figur semua umat beragama, tetapi hanya sebagai figur pada intern umat beragamanya saja (yang minoritas).

Faktor Pendukung Terjadinya Kerukunan antar-pemeluk Agama dan Aliran seagama di Kudus

Faktor yang mendukung terwujudnya kerukunan bagi warga Desa Colo adalah, pertama, kondisi kehidupan sosial warga Desa Colo kondusif karena sumber ekonomi stabil. Sumber perekonomian warga Desa Colo adalah (1) pedagang yang menjajakan dagangan bagi wisatawan/peziarah ke Makam Sunan Kudus dan makam Syekh Syadzali di Gunung Muria, (2) petani padi dan palawija, (3) perkebunan/peladang kopi, jeruk pamel, kunir, ketela pohon, dan sebagainya, (4) peternak lebah madu, (5) tukang ojek sepeda motor untuk pelayanan wisatawan/peziarah, (6) buruh, dan sebagainya. Para pengojek di Colo pada hari-hari non-liburan mampu meraup penghasilan per hari per orang rata-rata Rp 100 ribu. Pada hari libur mampu meraup Rp 250 s.d 300 ribu per hari per orang (*Suara Muria-Suara Merdeka*, 27 Juni 2012, hlm.21). Kedua, umat antar dan intern-pemeluk agama keduanya saling membaur dalam aktivitas sehari-hari di berbagai bidang kehidupan secara bersama-sama, seperti di lahan perekonomian, kerja bakti di kampung, dan perkumpulan sosial tingkat RT. Ketiga, warga Desa Colo tidak mudah tersulut konflik karena mengutamakan kerukunan hidup sosial dan beragama didukung oleh harmonisnya kehidupan sosial, sebagaimana paparan di atas.

Simpulan

Interaksi antar-pemeluk agama dan aliran seagama di Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus hingga tahun 2013 tetap harmonis disebabkan oleh: Pertama, adanya kerekatan dalam ikatan persaudaraan/kekerabatan yakni satu keturunan, mayoritas lahir dan dibesarkan bahkan menjadi tetangga dalam satu wilayah desa. Kedua, saling tercipta simbiosis mutualisme di bidang perekonomian dan pertetanggaan. Ketiga, minimnya pemicu konflik. Adapun faktor yang mendukung terciptanya

kerukunan antar dan intern pemeluk agama dan aliran di Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Pertama, kondisi kehidupan sosial warga Desa Colo kondusif karena sumber ekonomi stabil. Kedua, umat antar dan intern-pemeluk agama keduanya saling membaur dalam aktivitas sehari-hari di berbagai bidang kehidupan secara bersama-sama. Ketiga, warga Desa Colo tidak mudah tersulut konflik karena mengutamakan kerukunan beragama didukung oleh harmonisnya kehidupan sosial.

Dengan demikian, modal dasar terjadinya kerukunan sosial dalam beragama dan beda agama dapat dipupuk dengan mengedepankan pendekatan budaya yakni kesadaran saling memiliki ikatan budaya. Keberadaan budaya dikondisikan sebagai pilar kehidupan sosial di tengah peran negara (*state*) dalam mensejahterakan dan memberikan rasa aman kepada warga negara terkurangi. Hal ini akibat hadirnya kelompok yang melakukan kekerasan (*vigilante*) dan menciptakan situasi atau rasa tidak aman tak dikendalikan. Hal ini dipicu dampak negatif dari otonomi daerah yang membawa dua mata pisau yakni primordialisme yang menguat dan munculnya elit lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ama, Kornelis Kewa. *Pasar Barter Jembatan Persaudaraan Kristen-Muslim*. Kompas, 13 Desember 2010.
- Dania, Maya. *Empati dan Identitas Sosial*. Kompas, 22 Desember 2011.
- Fikri, Syahrudin el. *Rumput Kering Bernama Indonesia*. Republika, 3 Maret 2011.
- Kustiasih, Rini dan Kornelis Kewa Ama. *Dari Kue Kering hingga Tahbisan Pastor*. Kompas, 23 Desember 2011.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rakesarasin: Jakarta. 1996.
- Mudzhar, M. Atho. *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. 1998.

Moh. Rosyid

Surahmat. *Menakar Kekerasan Diri Kita. Kompas*, 28 Mei 2011.
Thoyyar, Husni. *Dunia yang Makin Tidak Toleran. Kompas*, 22
November 2011.